Makna Itikad Baik sebagai Landasan Hak Kepemilikan Pembeli: Wujud Standar Tindakan dalam Menentukan Kejujuran Pembeli

Redefining Good Faith as Justification of Purchaser Ownership Rights: The Face of Standard of Conducts on Determining Purchaser's Honesty

Muhammad Faisal*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding Email: muhammad_faisal@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memaparkan makna sebenarnya dari itikad baik sehingga ia dapat digunakan sebagai landasan kepemilikan bagi pembeli, terlebih lagi ketika pembeli ternyata membeli dari pihak yang tidak berhak mengalihkan benda. Masalah difokuskan pada pemaknaan ulang definisi itikad baik serta penentuan wujud standar tindakan pembeli beritikad baik yang dicerminkan melalui nilai etis kejujuran. Kejujuran pembeli dibuktikan dengan ketidaktahuan pembeli akan cacat cela benda, namun dewasa ini ketidaktahuan tidak cukup dengan pengetahuan aktual (*actual notice*) pembeli saja tetapi juga harus mempertimbangkan pengetahuan-pengetahuan yang diwajibkan oleh hakim (*constructive notice*). Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori etis dari Immanuel Kant yang akan memperlihatkan bahwa itikad baik adalah nilai tertinggi dalam kepemilikan yang menaungi baik prinsip perlindungan pemilik asli maupun perlindungan pembeli. Penentuan prioritas kepemilikan diantara mereka kemudian ditentukan oleh hakim melalui penerapan *constructive notice*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, data-data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa wujud sebenarnya standar tindakan itikad baik yang dikonstruksi oleh hakim adalah tindakan-tindakan kehati-hatian yang dilakukan oleh pembeli. Pada akhirnya beritikad baik atau tidaknya seorang pembeli ditentukan berdasarkan tindakan pencegahan yang memadai yang dilakukannya sebagai bentuk kewajiban berhati-hatinya.

Kata Kunci: Itikad Baik; Sengketa Kepemilikan; Prioritas Kepemilikan; Perlindungan Pembeli.

Abstract

This article aims to explain the true meaning of good faith as a basis for purchaser's ownership rights, especially when involves purchaser from not entitled seller. The issue is focused on redefining good faith and determining its standard of conducts which is reflected through the ethical value of honesty. Honesty is proofed by purchaser actual notice of defects on the objects, but nowadays actual notice is not enough, purchaser must also consider the knowledge required by the judge (constructive notice). Approaching this issue with Immanuel Kant's ethical theory will show that good faith is the highest value in ownership that contain both the principle of protection of true owner and the protection of purchaser. Ownership priority between them is then determined by the judge through the application of constructive notice. This study uses a normative juridical method, the data is collected through literature study and analyzed qualitatively. This study concludes that the actual form of good faith standard of conducts constructed by the judge is the duty of care that must be taken by the purchaser. At last, whether or not a purchaser is in good faith is determined based on the adequate precautionary actions that he has taken as his duty of care.

Keywords: Good Faith; Ownership Disputes; Priority Rule; Purchaser Protection.

How to Cite: Faisal, M. (2021). Makna Itikad Baik sebagai Landasan Hak Kepemilikan Pembeli: Wujud Standar Tindakan dalam Menentukan Kejujuran Pembeli. *Jurnal Mercatoria*. 14 (1): 9-19.

PENDAHULUAN

Permasalahan kepemilikan antara pemilik asli dengan pembeli beritikad baik bukanlah masalah baru lagi, namun penyelesaiannya masih menimbulkan permasalahan disparitas hukum (Lihat Ames, 1887; Mautner, 1991; Schwartz & Scott, 2011). Pertemuan antara prinsip *nemo dat* yang melindungi pemilik asli dan prinsip perlindungan pembeli beritikad baik yang melindungi pembeli menimbulkan kebingungan bagi praktisi hukum terutama hakim dalam mengadili sengketa kepemilikan yang ada. Terlebih lagi ketika pembeli membeli dari penjual yang tidak berhak. Disparitas yang terjadi tidak hanya dalam aturan pada berbagai negara, namun juga pada berbagai putusan dalam satu negara terutama terhadap negara-negara penganut sistem *civil law* (Lihat Dari-Mattiacci & Guerriero, 2015).

Pengadilan menjadi penentu kepemilikan para pihak yang bersengketa, oleh karenanya perkembangan hukum mengenai prioritas kepemilikan para pihak berkembang bersama dengan putusan-putusan pengadilan (Lihat Gjoni & Peto, 2017). Permasalahan kemudian muncul dalam praktik peradilan karena tidak ada standar yang dapat dijadikan patokan untuk menentukan prioritas kepemilikan yang dapat digunakan oleh hakim. Para hakim masih terbelah dalam 2 (dua) pertimbangan, yaitu pertimbangan yang pro prinsip *nemo dat* dan pertimbangan yang pro perlindungan pembeli beritikad baik (Lihat Dobrilă, 2014).

Artikel ini akan memperlihatkan bahwa permasalahan prioritas kepemilikan antara pemilik asli dengan pembeli tersebut dapat dijelaskan dengan pendefinisian ulang prinsip itikad baik yang telah dikenal selama ini. Untuk mendapatkan jawabannya, maka pengkonsepsian itikad baik akan dilakukan dari sisi etis itikad baik. Berbagai penelitian ilmiah telah banyak dilakukan untuk mendefinisikan itikad baik, baik melalui pendekatan perundang-undangan

sampai pada pendekatan kasus (Lihat Khairandy, 2000, 2009), namun tidak banyak yang melakukannya dengan pendekatan konsep nilai etis yang terkandung dalam prinsip itikad baik itu sendiri.

Artikel ini akan mencoba untuk mendefinisikan itikad baik melalui pemikiran Immanuel Kant mengenai *good will*. Dari pendekatan tersebut akan diperlihatkan bahwa prinsip-prinsip yang berlaku untuk kepemilikan (baik *nemo dat* maupun perlindungan pembeli beritikad baik) sebenarnya adalah prinsip yang diturunkan dari satu nilai etis yang sama, yaitu nilai etis itikad baik sebagai nilai kebajikan tertinggi dan terluas dari perbuatan hukum manusia.

Pendekatan *good will* dalam pendefinisian itikad baik akan memperlihatkan bahwa setiap perbuatan hukum manusia harus dilandasi oleh nilai etis yang dianutnya. Nilai etis tersebut berbeda-beda dalam tiap ranah hukum sehingga pengaturan itikad baik pada dasarnya dapat ditemukan dalam tiap-tiap ranah hukum yang ada. Nilai-nilai etis tersebut merupakan nilai yang diturunkan oleh prinsip itikad baik, sehingga pada dasarnya tidak mungkin itikad baik dapat didefinisikan dengan perwujudan satu nilai etis saja. Oleh karena itulah pendekatan ini kemudian meletakkan itikad baik sebagai nilai kebajikan tertinggi dan terluas dari perbuatan hukum manusia.

Artikel ini juga akan menjelaskan kepentingan pembentukan standar tindakan yang digunakan untuk menentukan keberadaan itikad baik pada diri seseorang, khususnya seorang pembeli. Pembentukan standar tindakan diperlukan sebagai patokan yang dapat digunakan hakim dalam menilai keberadaan itikad baik seorang pembeli. Namun demikian standar tindakan yang dikonstruksi oleh hakim bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan tanpa pertimbangan yang dalam karena standar tindakan

tersebut harus mengandung koherensi yang erat dengan nilai etis yang dianut (Lihat Gijssels & Hoecke, 2001). Oleh karena itu dalam artikel ini juga akan menjelaskan wujud dari standar tindakan yang digunakan dalam menentukan kejujuran dalam diri seorang pembeli.

Pembahasan dalam artikel ini dibagi dalam 3 (tiga) bagian: Bagian I akan menjelaskan bagaimana prinsip *good will* Kantian dapat diterapkan untuk memaknai itikad baik dalam hukum kebendaan sebagai dasar pemilikan benda. Bagian II akan menjelaskan akibat yang ditimbulkan dari pendefinisian ulang itikad baik melalui pendekatan *good will* Kantian dalam paradigma itikad baik pada umumnya. Terakhir pada Bagian III akan melanjutkan permasalahan praktis yang terjadi dalam peradilan dengan memberikan penjelasan terhadap standar tindakan yang harus diterapkan dalam menentukan keberadaan nilai etis kejujuran dalam diri pembeli.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif sebagai suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Ibrahim, 2007).

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Marzuki, 2011). Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi Peneliti dalam membangun suatu

argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Itikad Baik dengan Pendekatan Konsep *Good Will* Kantian

Itikad baik telah dicoba untuk didefinisikan dari zaman Romawi Kuno oleh Cicero pada buku 3 *de officiis* (Cicero, 1913). Cicero memberikan pendekatan yang paling lengkap sampai dengan zaman sekarang mengenai itikad baik, yaitu sebagai nilai kebaikan/moral yang mengekspresikan kesadaran untuk berlaku jujur berdasarkan hati nuraninya yang dapat menjadi landasan perlindungan dirinya dari tipu muslihat dan gerakan-gerakan licik yang berbahaya, tidak jujur dan sesat, dari percobaan penipuan yang licik dan jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu dan mengetahui untuk mengambil keuntungan dengan memanfaatkan kepercayaannya, kesederhanaan dan ketidaktahuannya (Lihat Pei Yee, 2001).

Walaupun Cicero telah mengakui keberadaan itikad baik dalam hukum, namun pengaturannya dalam *ius civile* baru terwujud setelah adanya penerapan yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara yang ada sehingga yang terjadi adalah pengesampingan *stricti iuris iudicia* oleh hakim berdasarkan *bona fides iudicia* (Lihat Fauvarque-Cosson & Mazeaud, 2009). Hal ini layaknya *law and equity* dalam sistem peradilan Inggris (Zimmermann & Whittaker, 2000). Jika logika itu yang dicapai, maka itikad baik dapat dikatakan sebagai instrumen pencapaian *equity*, yaitu ekspresi keadilan yang digunakan sebagai pengkoreksi ketidakadilan pada *summum ius* (Schermaer, 2000).

Pengaturan itikad baik pada mulanya hanya ada ranah hukum kontrak. Berbeda dengan itu, Hartkamp mengatakan bahwa itikad baik harus bisa diterapkan pada seluruh ranah hukum patrimonial (Hartkamp, 1992). Di Jerman, pengaturan

itikad baik berada tidak hanya dalam semua ranah hukum privat, tetapi juga ada dalam hukum administratif, hukum pajak, hukum acara, dan berbagai ranah hukum lainnya (Lihat Hesselink, 2011).

Hesselink mengatakan lebih jauh lagi, bahwa pengaturan itikad baik tidak berhenti di ranah hukum tertentu, tetapi ada dalam semua ranah hukum. Pemikiran Hesselink terbentuk dari analogi 3 (tiga) fungsi utama itikad baik, yaitu (1) *Concretisations*; (2) *Supplementations*; dan (3) *Corrections to the rules and system of the code*.

Terkait dengan itu, Hesselink mengatakan bahwa itikad baik hanyalah *mouthpiece* (jargon) yang digunakan hakim untuk mengkonstruksi hukum dalam putusannya karena fungsi itikad baik sama dengan fungsi hakim dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karenanya itikad baik tidak hanya mengenai ranah hukum perdata, namun harus bisa diaplikasikan pada setiap ranah hukum yang ada.

Pandangan Hesselink tersebut tidak diterima tanpa kritik. W. Snijders kemudian mengkritik pandangan Hesselink dengan mengatakan bahwa itikad baik bukan merupakan jargon yang seenaknya dapat digunakan hakim untuk mengkonstruksi hukum, lebih dari itu, itikad baik adalah standar yang dimintakan oleh pencari keadilan ke pengadilan (Schelhaas, 2017).

Schellhaas mengambil jalan tengah dalam perdebatan tersebut dengan mengatakan itikad baik berisikan standar tindakan yang dimintakan oleh pencari keadilan di pengadilan untuk diterapkan kepada lawan (*counterpart*) dalam sengketa yang ada. Namun di sisi lain, itikad baik juga dapat dikatakan sebagai alat bagi hakim untuk mengkonstruksi hukum karena untuk menerapkan standar tindakan yang dimintakan, maka hakim secara tidak langsung harus mengkonstruksi hukum yang belum diatur sebelumnya dalam hukum positif. Jadi ada

2 pandangan yang dapat diambil dari itikad baik, yaitu pandangan yang melihat itikad baik sebagai standar tindakan dan itikad baik sebagai instrumen hakim untuk mengkonstruksi hukum (Schelhaas, 2017).

Artikel ini mencoba memberikan argumen untuk mencari penjelasan dari permasalahan ini dengan pendekatan metafisis Kant. Itikad baik memiliki nilai-nilai yang dijelaskan sebagai *good will* oleh Kant, yaitu sebagai kebajikan tertinggi yang dapat diterapkan pada semua bidang dalam kehidupan. Kant mengatakan bahwa "*There is nothing it is possible to think of anywhere in the world, or indeed anything at all outside it, that can be held to be good without limitation, excepting only a good will.*" (Kant, 2002).

Walaupun dalam Buku *Groundworks of the Metaphysics of Morals*, Kant mengatakan bahwa *good will* adalah kebaikan tanpa batas, namun Kant tidak pernah memberikan pengertian yang jelas mengenai *good will* dalam karyanya tersebut. *Good will* digunakan Kant untuk memperoleh formula pengertiannya mengenai moralitas (Wood, 2003). Kant menjelaskan bagaimana menentukan seseorang yang bermoral melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu dari kebebasannya (*autonomy v. heteronomy*), kehendaknya (*duty v. inclination*) dan alasannya (*categorical v. hypothetical*) (Sandel, 2011).

Kebebasan (*freedom*) berarti manusia yang bertindak sesuai dengan kehendaknya (*autonomy*) bukan atas suruhan orang lain (*heteronomy*). Kehendak manusia bebas adalah kehendak sesuai dengan prinsip murninya, yaitu kehendak untuk tujuan diri semata (*duty*) bukan kehendak dari dorongan hati/simpati/belas kasihan (*inclination*) (Wood, 2003). Tujuan yang ingin dicapai adalah melaksanakan nilai kebaikan yang menjadi prinsipnya (*categorical imperatives*), bukan dengan tujuan-tujuan lain yang menguntungkan atau

membahagiakan dirinya (*hypothetical imperatives*) (Sandel, 2011).

Dalam teori Kant, hal terpenting dalam tindakan seseorang adalah kebebasan (*equal freedom*) yang melandasinya. Orang bermoral adalah orang bebas yang melakukan segala sesuatu berdasarkan nilai kebaikan yang dianutnya semata (Allison, 1997). Kant menyebutkan bahwa nilai kebaikan tertinggi yang tidak memiliki batas adalah *good will*. *Good will* sebagai kebaikan tanpa batas mengakibatkan *good will* ada pada semua tindakan hukum yang bermoral dan tidak terlepas dari itu adalah suatu kepemilikan kebendaan.

Menurut Kant kepemilikan seseorang terhadap suatu benda haruslah didasarkan atas suatu kehendak yang baik juga (Verhaegh, 2004). Sejalan dengan prinsip *good will*, keberadaan itikad baik juga berfungsi untuk menentukan baik-tidaknya kepemilikan suatu kebendaan tersebut. Maksudnya adalah keberadaan itikad baik menjadi jaminan bahwa suatu kepemilikan tersebut dilandasi pada suatu nilai yang baik (nilai etis), namun nilai etis tersebut berbeda-beda bagi setiap orang sebagai individu yang bebas.

Sebagai manusia yang bebas, ia dapat dengan bebas menganut nilai etis dalam berbagai tindakannya, namun demikian hal ini ternyata dapat menyebabkan benturan kepentingan antar manusia yang menganut nilai etis yang berbeda dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, menurut Kant, agar suatu kepemilikan dapat diakui dan dilindungi dalam masyarakat, maka masyarakat sosial tersebut haruslah menganut suatu nilai etis yang sama.

Kant mengatakan dalam suatu masyarakat sosial, nilai etis tersebut haruslah nilai yang dapat diterima secara umum, misalnya adalah prinsip yang mengatakan bahwa ia tidak akan menggunakan barang milik orang lain dan sebaliknya pula orang lain tidak akan menggunakan barang miliknya sehingga terdapat suatu prinsip yang berlaku umum

(Sandel, 2011). Prinsip tersebut muncul dari kehendak yang mengikat setiap orang, bersifat umum, kolektif dan otoritatif sehingga memberikan jaminan akan keamanan kepemilikan. Menurut Kant, prinsip semacam itu hanya bisa muncul dalam kehidupan bermasyarakat (*civil state*) sehingga pengakuan akan adanya kepemilikan benda hanya bisa dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat (Kant, 2012).

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa pengakuan kepemilikan seseorang pada dasarnya sangat bergantung pada nilai etis yang ada yang dapat diterima secara umum dalam masyarakat sosial tersebut. Itikad baik sebagai kebajikan tertinggi pada dasarnya hanya melegitimasi keberadaan nilai etis turunannya. Dalam ranah kepemilikan, nilai etis turunan tersebut dapat berupa larangan mengalihkan benda yang bukan miliknya (*nemo dat*) ataupun perlindungan terhadap pembeli jujur yang tidak mengetahui cacat cela benda (pembeli beritikad baik). Justifikasi kepemilikan pembeli jujur pada akhirnya terletak pada nilai etis yang hidup dalam masyarakat sosial, karena pembenaran terhadap tindakan pembeli harus diakui dahulu oleh masyarakat sosial baru bisa diterapkan dalam peradilan. Hal inilah yang membuat pengaturan pembeli beritikad baik berbeda-beda di tiap negara (Levmore, 1987).

Masalah kepemilikan tidak berhenti disitu saja, kepemilikan tidaklah terpaku pada apa yang benar saja tetapi menyangkut juga apa yang secara etika memiliki nilai-nilai kebaikan. Hal yang terakhir inilah yang diwadahi dalam kepemilikan yang beritikad baik. Persaingan kepemilikan antara pemilik asli yang berhak dan pembeli beritikad baik yang bermoral (etis) merupakan persaingan yang seimbang karena kepemilikan keduanya didasari oleh itikad baik. Bagi Kant persaingan semacam itu harus dihindari karena melibatkan terlalu

banyak ketidakadilan dan merugikan kehidupan manusia (Verhaegh, 2004). Namun dalam praktiknya persaingan sedemikian rupa tidaklah mungkin dapat dielakkan, sehingga jika timbul persaingan tersebut, Kant mengatakan penyelesaiannya haruslah dinilai dari sisi etis kepemilikannya karena jika dinilai dari sisi keberhakkan, kedua-duanya adalah pihak yang berhak.

Dalam menilai sisi etis kepemilikan yang beritikad baik, Kant mempertimbangkan adanya faktor *culpability* (kelalaian) yang dapat merusak nilai etis dari suatu kepemilikan. Kant mengatakan bahwa kelalaian adalah kegagalan dari kewajiban etis (*ethical duties*) karena manusia memiliki *maxim* untuk tidak berbuat lalai. Kelalaian menghilangkan hak kepemilikan seseorang karena kelalaian merupakan penyimpangan dari kewajibannya (Kant, 2008)

Memaknai itikad baik melalui pendekatan *good will* Kantian berarti meletakkan itikad baik sebagai kebajikan tertinggi dalam perbuatan hukum manusia. Maksudnya adalah itikad baik menjamin bahwa perbuatan hukum seseorang itu dilandasi dengan suatu nilai kebaikan (nilai etis). Apakah itikad baik hanya merupakan jargon bagi hakim untuk mengkonstruksi standar tindakan?

Walaupun fungsi itikad baik memiliki kemiripan dengan tugas hakim di pengadilan, namun yang dikonstruksi oleh hakim pada dasarnya bukan merupakan standar tindakan itikad baik sebagai kebajikan tertinggi, tetapi yang sebenarnya dikonstruksi oleh hakim adalah nilai etis turunan dari itikad baik itu sendiri. Dalam hal kepemilikan pembeli beritikad baik, yang kemudian dikonstruksi hakim adalah standar tindakan dari nilai etis kejujuran, yaitu standar-standar tindakan yang dapat digunakan untuk menentukan seorang pembeli itu jujur atau tidak. Oleh karena itu yang dikonstruksi oleh hakim bukanlah standar tindakan itikad baik seutuhnya,

melainkan sebagian dari nilai kebajikan itikad baik, yaitu nilai-nilai etis yang dianut dalam masyarakat sosial.

Konsekuensi Pemaknaan Itikad Baik Berdasarkan Konsep *Good Will* Kantian: Ketidakrelevanan Pembagian Dimensi Subjektif dan Objektif Itikad Baik dalam Ranah Hukum Tertentu

Para ahli hukum telah membuat perbedaan antara dimensi subjektif dan dimensi objektif itikad baik. Dimensi subjektif diaplikasikan dalam ranah hukum kebendaan, yang lazimnya didefinisikan sebagai keadaan pikiran seseorang yang tidak mengetahui akan fakta atau kejadian tertentu yang disebut dengan kejujuran (Subekti, 2014). Sedangkan dimensi objektif itikad baik diaplikasikan dalam ranah hukum perikatan, yang lazimnya didefinisikan sebagai standar tindakan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian, apakah para pihak telah melaksanakan perjanjian dengan sewajarnya (MacMahon, 2015). Dengan memaknai itikad baik melalui pendekatan *good will* Kantian, Peneliti berpendapat bahwa pembagian dimensi itikad baik dalam ranah hukum tertentu itu sudah tidak relevan lagi dilakukan.

Pertama, sebagai kebajikan tertinggi yang menaungi nilai-nilai etis yang menjadi motif tindakan seseorang, itikad baik tidak seharusnya dibatasi ke dalam satu jenis nilai etis saja (kejujuran). Keadaan pikiran seseorang yang mengandung nilai etis kejujuran saja tidak dapat merepresentasikan keseluruhan dinamika nilai etis itikad baik sebagai kebajikan tertinggi. Itikad baik menaungi nilai-nilai etis dalam semua perbuatan hukum manusia di berbagai ranah hukum yang ada. Oleh karena itu setiap ranah hukum menganut nilai etis yang berbeda-beda, misalnya ranah hukum kebendaan menganut nilai etis kejujuran, sedangkan ranah hukum perikatan menganut nilai etis kebebasan dan proporsionalitas kontrak (Lihat Hernoko, 2016). Dengan

demikian, dimensi subjektif itikad baik yang didefinisikan sebagai kejujuran hanyalah merepresentasikan salah satu nilai etis turunan yang dinaungi itikad baik bukan pendefinisian itikad baik yang seutuhnya.

Kedua, begitu pula dengan pembagian itikad baik ke dalam dimensi objektifnya. Tidak mungkin ada standar tindakan yang dapat merepresentasikan nilai kebajikan itikad baik seutuhnya. (Lihat Hesselink, 2011). Yang dicoba direpresentasikan dalam ranah hukum perikatan hanyalah standar-standar tindakan sebagai perwujudan nilai etis yang dianut di dalam ranah hukum perikatan. Tidak terlepas dalam ranah hukum kebendaan, walaupun dikatakan bahwa itikad baik dalam ranah hukum kebendaan ada dalam dimensi subjektifnya, namun dalam pengaturannya tetap menggunakan dimensi objektifnya, yaitu ketidaktahuan pembeli akan cacat cela yang terkandung dalam benda (Lihat Jones, 2015).

Ketiga, ketidakrelevanan pembagian dimensi itikad baik dalam ranah hukum tertentu makin tampak dalam praktek peradilan. Dalam sengketa kepemilikan khususnya, tidak mungkin hakim dapat menilai kejujuran dalam diri seseorang tanpa menggunakan standar-standar tindakan yang ada. Dimensi subjektif itikad baik saja tidak dapat digunakan untuk memutus suatu perkara karena dalam pengaplikasian dimensi subjektifnya, hakim menilainya melalui standar tindakan (dimensi objektif) yang dikonstruksi untuk itu sehingga dimensi objektifnya juga wajib dipertimbangkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka tepat jika dikatakan bahwa pembagian dimensi itikad baik dalam ranah-ranah hukum tertentu (dimensi subjektif untuk ranah hukum kebendaan dan dimensi objektif untuk ranah hukum perikatan) sudah tidak relevan lagi digunakan. Hal ini dikarenakan dalam penyelesaian sengketa itikad baik di pengadilan, hakim perlu menentukan apa dimensi subjektifnya

(nilai etis apa yang dianut dalam ranah hukum tersebut) dan juga apa dimensi objektifnya (standar tindakan yang dikonstruksi untuk membuktikan keberadaan nilai etis tersebut) sehingga dalam tiap ranah hukum yang ada, pengaturan itikad baiknya harus mengandung dimensi subjektif dan dimensi objektifnya sekaligus yang tidak terpisahkan.

Wujud Standar Tindakan untuk Menentukan Keberadaan Nilai Etis Kejujuran dalam Diri Pembeli

Jika diurut secara terbalik, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan itikad baik dalam perbuatan hukum seseorang hanya dapat ditentukan dengan pembuktian eksistensi nilai etis dalam diri seseorang tersebut. Penentuan keberadaan nilai etis sebagai motif perbuatan hukum seseorang hanya dapat dilakukan melalui pengujian perbuatan hukum seseorang dengan standar tindakan yang ada. Hal ini terjadi karena idealnya nilai etis tidak membebaskan kewajiban bagi seseorang, melainkan hanya memberikan *maxim* untuk tindakan (Kant, 2012). Maksudnya adalah untuk dapat dikatakan menganut suatu nilai etis yang ada, seseorang tersebut harus secara bebas mengadopsinya dengan melaksanakan standar-standar tindakan yang wajar untuk itu bukan karena dipaksakan oleh suatu aturan yang berlaku. Jadi nilai etis itu ada pada diri seseorang bukan karena ia mengikuti aturan yang mengikat, namun ia bertindak sedemikian rupa untuk menegakkan nilai etis yang dianutnya tersebut.

Tiap ranah hukum menganut nilai etisnya masing-masing sehingga dalam tiap ranah hukum memiliki standar tindakan yang berbeda pula dan tidak dimungkinkan membuat standar tindakan yang dapat merepresentasikan semua nilai etis yang ada. Oleh karena itu, dalam bagian ini yang akan dibahas hanyalah standar tindakan yang diaplikasikan dalam

perlindungan pembeli yang jujur. Perlu diingat sebelumnya bahwa standar tindakan nilai etis kejujuran dalam diri pembeli bukanlah dimensi objektif itikad baik, melainkan lebih tepat jika dikatakan bahwa ia merupakan dimensi objektif nilai etis kejujuran.

Perkembangan prinsip perlindungan pembeli yang jujur memperlihatkan bahwa para ahli hukum lazimnya menyepakati bahwa dalam menentukan keberadaan nilai etis kejujuran dalam diri pembeli dilakukan dengan pemenuhan 2 (dua) standar tindakan, yaitu: (1) peralihan dengan pengorbanan (*with value*); dan (2) tidak mengetahui cacat cela benda (*without notice*) (Jones, 2015). Perbedaan terjadi dalam standar tindakan *with value* diantara sistem hukum *common law* dan *civil law*. Dalam sistem *common law*, *with value* diartikan secara harfiah, yaitu untuk mendapatkan benda seseorang wajib mengeluarkan suatu pengorbanan, oleh karena itu, seseorang yang menerima waris dan hibah tidak tergolong pada kategori perlindungan pembeli yang jujur. Sedangkan dalam sistem *civil law*, *with value* diartikan sebagai kesesuaian dengan tata cara peralihan benda yang diatur dalam hukum, oleh karenanya penerima waris dan hibah masih masuk dalam kategori perlindungan pembeli yang jujur (Lihat Virgo, 2015).

Dari kedua standar tindakan tersebut, Ames mengatakan bahwa standar tindakan *without notice* adalah yang paling penting diantaranya karena keadaan tidak mengetahui cacat cela benda adalah alasan etis yang dapat dibenarkan bagi pembeli untuk dapat memiliki benda dan juga mengalihkan benda yang telah dimilikinya tersebut (Ames, 1887). Permasalahannya adalah apakah mungkin menilai pengetahuan seseorang akan cacat cela benda? atau lebih dari itu, apakah mungkin menilai kejujuran dalam diri seseorang? Jawabannya pastilah antara tidak mungkin

ataupun merupakan hal yang sangat sulit untuk ditentukan.

Untuk dapat menilai pengetahuan seseorang, para ahli hukum sepakat mengembangkan 2 (dua) jenis patokan yang dapat digunakan hakim, yaitu pengetahuan akan fakta yang tampak (*actual notice*) dan pengetahuan konstruktif yang dibebankan oleh hukum (*constructive notice*). *Actual notice* merupakan pengetahuan yang tampak terkait hak kepemilikan sebelumnya, hak klaim ataupun hak lainnya yang terdapat dalam benda yang dapat terlihat dalam register benda atau yang diperlihatkan oleh penjual. Sedangkan *constructive notice* adalah pengetahuan yang diperhitungkan oleh hukum, maksudnya adalah pengetahuan yang tidak wajib diketahui, namun seharusnya diketahui sebagai suatu kewajiban (Long, 1920).

Dahulu *constructive notice* tidak diperhitungkan dalam pembuktian kejujuran pembeli karena secara logika jika pembeli mencari tahu segala sesuatu yang seharusnya ia ketahui tersebut maka pengetahuan yang ia dapatkan tersebut akan berubah menjadi *actual notice* atau dengan kata lain *constructive notice* tidak diperhitungkan karena ia merupakan fiksi hukum yang mana jika diperhitungkan *constructive notice* tersebut pasti telah berubah menjadi *actual notice* (Lihat Mee, 1995). Namun dewasa ini, keberadaan *constructive notice* telah diperhitungkan dalam membuktikan kejujuran seorang pembeli (O'Dell, 1997).

Dewasa ini, pertimbangan *actual notice* saja tidaklah cukup untuk membuktikan ketidaktahuan pembeli atas cacat cela yang terdapat pada benda. Jika *actual notice* saja yang dipertimbangkan, maka semua jual beli akan menjadi sah jika persyaratan formilnya sudah terpenuhi. Padahal dalam praktiknya, dapat saja terjadi sengketa dimana penjual dan pembeli saling bekerja sama untuk mengambil hak pemilik asli dengan cara-cara yang memanfaatkan *actual notice*

yang ada. Kemunculan pertimbangan *constructive notice* dalam penilaian pengetahuan pembeli menyebabkan hakim harus mengkonstruksi kewajiban bagi pembeli untuk melakukan tindakan-tindakan lain di luar yang diwajibkan oleh hukum positif namun menjadi kebiasaan wajar yang terjadi dalam pergaulan masyarakat sosial. Keberadaan *constructive notice* dalam membuktikan kejujuran pembeli bukanlah dimaksudkan agar hakim memperhitungkan segala sesuatu yang seyogyanya diketahui oleh pembeli, namun keberadaan *constructive notice* ditujukan agar pembeli melakukan segala upaya dengan patut untuk menghindari kewajiban *constructive notice* terhadap dirinya sehingga yang diperhitungkan adalah upaya pembeli tersebut agar dirinya patut menyandang predikat pembeli yang jujur (Mee, 1995).

Berdasarkan hal tersebut, maka standar tindakan pembeli yang jujur adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pembeli untuk menghindari kewajiban *constructive notice* bagi dirinya. Para ahli hukum berdebat bahwa upaya yang dilakukan tersebut adalah upaya-upaya untuk menghindari terjadinya sengketa yang dilakukan oleh pembeli (Mautner, 1991) atau dengan kata lain kewajiban kehati-hatian (*duty of care*) pembeli. Oleh karena itu, standar tindakan yang dikonstruksi hakim tidak lain merupakan bentuk-bentuk *duty of care* yang harus dilakukan pembeli sehingga pembeli yang melaksanakan *duty of care* adalah pembeli yang jujur. Selain dalam bentuk tindakan *duty of care*, kriteria selanjutnya adalah standar tindakan merupakan perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat sosial, dalam artian bahwa apa yang ia lakukan juga akan dilakukan orang lain kepadanya sebagai suatu kebiasaan yang dapat diekspektasi masyarakat sosial (MacMahon, 2015).

Pada akhirnya dalam menentukan keberadaan kejujuran dalam diri pembeli, hakim menilai *duty of care* yang telah

dilakukan pembeli untuk mencegah terjadinya sengketa kepemilikan dan *duty of care* itu adalah tindakan-tindakan dalam kebiasaan yang dapat diekspektasi masyarakat sosial. Penilaian hakim atas terpenuhinya *duty of care* pembeli mengakibatkan ia mendapatkan predikat kejujurannya dan sebagai pembeli yang jujur, ia baru dapat bersaing mendapatkan kepemilikan benda dengan pemilik asli.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat 3 (tiga) simpulan yang dapat disampaikan. *Pertama*, memaknai itikad baik dengan pendekatan konsep *good will* Kantian berarti meletakkan itikad baik sebagai nilai kebajikan tertinggi yang mendasari semua perbuatan hukum manusia. Keberadaan itikad baik menjamin bahwa tindakan hukum manusia didasari oleh suatu nilai kebaikan (nilai etis) yang merupakan nilai turunan dari itikad baik itu sendiri. Dalam hal kepemilikan benda, nilai etis turunan itikad baik yang dikenal adalah prinsip *nemo dat* dan prinsip perlindungan pembeli yang jujur. Pemaknaan semacam ini menyebabkan pembagian dimensi itikad baik ke dalam ranah hukum tertentu menjadi tidak relevan lagi dilakukan karena setiap ranah hukum menganut nilai etis yang berbeda dan setiap nilai etis yang ada membutuhkan standar tindakan untuk membuktikan keberadaannya.

Kedua, pembuktian keberadaan kejujuran dalam diri pembeli dilakukan dengan pemenuhan standar tindakan *with value* dan *without notice*. Dewasa ini perkembangan standar tindakan *without notice* memberikan ruang bagi *constructive notice* untuk turut diperhitungkan. Keberadaan *constructive notice* ditujukan agar pembeli melakukan segala upaya dengan patut untuk menghindari kewajiban *constructive notice* terhadap dirinya.

Ketiga, upaya-upaya tersebut didefinisikan sebagai upaya pembeli untuk

menghindari terjadinya sengketa atau dengan kata lain kewajiban kehati-hatian (*duty of care*) pembeli. Oleh karena itu, standar tindakan yang dikonstruksi hakim tidak lain merupakan bentuk-bentuk *duty of care* yang harus dilakukan pembeli sehingga hanya pembeli yang melaksanakan *duty of care*-lah yang dapat dikategorikan sebagai pembeli jujur yang patut dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Allison, H. E. (1997). We Can Act Only under the Idea of Freedom. *Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association*, 71(2), 39–50.
- Ames, J. B. (1887). Purchase for Value Without Notice. *Harvard Law Review*, 1(1), 1–16.
- Cicero, M. T. (1913). *De Officiis With an English Translation by Walter Miller*. Macmillan Company.
- Dari-Mattiacci, G., & Guerriero, C. (2015). Law and Culture: A Theory of Comparative Variation in Bona Fide Purchase Rules. *Oxford Journal of Legal Studies*, 35(3), 543–574.
- Dobril, M. C. (2014). Bona Fide Purchaser and the Sale of a Property Belonging To Another. Questions on the Evolution of Jurisprudence in This Field Under the New Civil Code. *Journal of Public Administration, Finance and Law, special*, 105–111.
- Fauvarque-Cosson, B., & Mazeaud, D. (2009). *European Contract Law: Materials for a Common Frame of Reference: Terminology, Guiding Principles, Model Rules*. Walter de Gruyter.
- Gijssels, J., & Hoecke, M. Van. (2001). *Wat is Rechtsteorie?* Diterjemahkan oleh B. Arif Sidharta. "Apakah Teori Hukum Itu?" *Seri Dasar-dasar Ilmu Hukum* 3. Cet. 3. Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Gjoni, G., & Peto, Z. (2017). An Overview of Good Faith as a Principle of Contractual Interpretation with Special References to the Albanian Law. *European Scientific Journal*, 13(25), 288–296.
- Hartkamp, A. S. (1992). Judicial Discretion under the New Civil Code of the Netherlands. *The American Journal of Comparative Law*, 40(3), 551–571.
- Hernoko, A. Y. (2016). Asas Proporsionalitas sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Kontrak Komersial. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(3), 447–466.
- Hesselink, M. W. (2011). The Concept of Good Faith. Dalam A. S. Hartkamp, M. W. Hesselink, E. H. Hondius, C. du Perron, & C. Mak (Eds.), *Towards A European Civil Code, 4th Fully Revised and Expanded Edition* (pp. 619–649). Kluwer Law International.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 3. Bayumedia Publishing.
- Jones, J. W. (2015). *The Position and Rights of a Bona Fide Purchaser for Value of Goods Improperly Obtained*. Cambridge University Press.
- Kant, I. (2002). *Groundwork for the Metaphysics of Morals*. Diterjemahkan oleh A.W. Wood. Yale University Press.
- Kant, I. (2008). *Fundamental Principles of The Metaphysic of Moral*. Diterjemahkan oleh Mary Gregor. Cambridge University Press.
- Kant, I. (2012). *The Science of Right*. Diterjemahkan oleh W. Hastie. Start Publishing.
- Khairandy, R. (2000). Kewenangan Hakim untuk Melakukan Intervensi terhadap Kewajiban Kontraktual Berdasarkan Asas Iktikad Baik. *Jurnal Hukum*, 7(15), 92–117.
- Khairandy, R. (2009). Makna. Tolok Ukur, Pemahaman. dan Sikap Pengadilan di Indonesia terhadap Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak. *Jurnal Hukum*, 16(Khusus), 51–71.
- Levmore, S. (1987). Variety and Uniformity in the Treatment of the Good-Faith Purchaser. *The Journal of Legal Studies*, 16(1), 43–65.
- Long, J. R. (1920). Notice in Equity Author. *Harvard Law Review*, 34(2), 137–160.
- MacMahon, P. (2015). Good faith and Fair Dealing as an Underenforced Legal Norm. In *Minnesota Law Review*, 99(6), 2051–2110.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum* (cet. 7). Kencana Prenada Media Group.
- Mautner, M. (1991). The Eternal Triangles of the Law: Toward a Theory of Priorities in Conflicts Involving Remote Parties. *Michigan Law Review*, 90(1), 95–154.
- Mee, J. (1995). Undue Influence, Misrepresentation and the Doctrine of Notice. *The Cambridge Law Journal*, 54(3), 536–544.
- O'Dell, E. (1997). Restitution, Coercion by a Third Party, and the Proper Role of Notice. *The Cambridge Law Journal*, 56(1), 71–79.
- Pei Yee, W. (2001). Protecting Parties' Reasonable Expectation: A General Principle of Good Faith. *Oxford University Commonwealth Law Journal*, 1(2), 195–229.
- Sandel, M. J. (2011). *Justice: What's The Right Thing To Do?* Farrar, Straus and Giroux.
- Schelhaas, H. N. (2017). *Redelijkheid en Billijkheid*. Wolter Kluwer.

- Schermair, M. J. (2000). Bona Fides in Roman Contract Law. In S. Zimmermann, Reinhard ; Whittaker (Ed.), *Good Faith in European Contract Law*. Cambridge University Press.
- Schwartz, A., & Scott, R. E. (2011). Rethinking The Laws of Good Faith Purchase. *Columbia Law Review*, 111(6), 1332–1383.
- Subekti. (2014). *Aneka Perjanjian*. Citra Aditya Bakti.
- Verhaegh, M. (2004). Kant and Property Rights. *Journal of Libertarian Studies*, 18(3), 11–32.
- Virgo, G. (2015). *The Principle of the Law of Restitution* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Wood, A. W. (2003). The Good Will. *Philosophical Topics*, 31(1/2), 457–484.
- Zimmermann, R., & Whittaker, S. (2000). Good Faith in European Contract Law: Surveying The Legal Landscape. Dalam R. Zimmermann & S. Whittaker (Eds.), *Good Faith in European Contract Law*. Cambridge University Press.